

DILEMA ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERAU DALAM TINDAK PIDANA PERS

Dilema Asas Lex Specialis Derogat Legi Generau dalam Tindak Pidana Pers

SITTA ZULAIKHAH

030010847 U

2004

75

SKRIPSI FH

Astutik, S.H., M.H.

Adanya dilema asas "*lex specialis derogat legi generali*" atau tidak pada Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan untuk penegakan hukum pidana dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Sehingga untuk menyelesaikan kasus-kasus pers banyak hakim yang akan memilih menggunakan KUHP. Karena sudah terbiasa menggunakan KUHP, tapi juga karena dalam Undang-undang Pers belum mencakup semua persoalan pers. Dengan sistem pertanggungjawaban fiktif pada Undang-undang Pers, kurangnya pemahaman secara utuh oleh hakim dan aparat penegak hukum akan Undang-undang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), serta pelaksanaan tugas jurnalistik yang tidak sesuai dengan kode etik profesi. Diikuti dengan tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalah pers menjadi kendala yang sering dihadapi pada kasus-kasus pers.

Tindak Pidana Pers, Lex Specialis Derogat Legi Generau

1. Retnowati, Anny. *Tinjauan Terhadap Pendapat Pro & kontra Perubahan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, JEP, Volume 22, No.2, Desember 2002.
2. Manan, Bagir. *Dasar Dasar Perundangan-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill- CO, 1992.
3. Duswara Machmudin, Dudu. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Refika, 2000.
4. Emong S. Komariah. *Kecenderungan Pelanggaran Hukum dan Etika di Bidang Pers Serta Penanggulangannya*.
5. Oetama, Jacob. *PERS INDONESIA, Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*, Kompas, Jakarta, Oktober, 2001
6. Panjaitan, Hinc. *Gunakan Hak Jawab, Hak Koreksi & Kewajiban Koreksi Anda, Ombudsman Memfasilitasinya*. JP Press. 2003.
7. Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press.

8. Seno Adji, Oemar. *Pers, Aspek-Aspek Hukum*, Erlangga, 1997.
9. Siregar, R.H. *Antara Kebebasan Pers dan Tindak Kekerasan*.
10. Brotodirejo, R.H Soebroto. *Menyongsong Undang-Undang Kepolisian yang Baru*, Jakarta: PTIK, 1984.
11. Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
12. Tasrif, Suardi. *Harian Kompas*, 13 Januari 1985.
13. Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
14. Undang-Undang Nomor **14** Tahun 1985 *Tentang Mahkamah Agung*.
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 *Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah*.
16. Undang-Undang No 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintah Daerah*.
17. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 *Tentang Pers*.
18. *Harian Jawa Pos*, Minggu, 17 Oktober 2004.
19. *Harian Kompas*, 1 Oktober 2001.
20. *Pilars*, No 37/Th.VII/13-19 September 2004.
21. *Harian Suara Pembaruan*, Jum'at 23 Januari 2004 .